

## KESERASIAN DALAM MASYARAKAT MAJEMUK

Padang, 18 Juli 2001

Panitia Seminar meminta saya menyampaikan makalah tentang “Keserasian dalam Masyarakat Majemuk”, khususnya antar warga pendatang dengan penduduk setempat atau penduduk asli atau putera daerah. Makalah ini mengulas tentang interaksi sosial antara pendatang dan penduduk lokal. Dasar pertimbangan panitia meminta saya berbicara diforum ini, mungkin karena saya pernah menjadi Menteri Transmigrasi yang erat hubungannya dengan upaya pembauran antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli. Mengikuti pepatah Jerman :”In der beschränkung zeigt sich erst der meister” (Didalam kemampuannya membatasi diri itu terletak keunggulan kepemimpinannya), saya akan membatasi pembicaraan saya ini dibatas wilayah yang saya kuasai saja.

Berbaurnya berbagai suku di berbagai tempat di Indonesia pada, umumnya telah berlangsung dengan baik dan terjadi akulturasi dan kawin campur, membangun kehidupan yang harmonis. Proses itu telah pula memunculkan kelompok masyarakat baru dan etnis baru seperti Jawa-Deli; Bali-Parigi, Irian Jawa sebagai plesetan untuk orang Jawa yang di Irian, Manado Poso, Jawa Tondano, orang-orang Osing di Banyuwangi, Madura Situbondo, Baja (Batak Jakarta) untuk orang-orang Batak di Jakarta yang sudah tidak bisa berbahasa Batak dan lain-lain. Orang-orang Cirebon dan Banten bukan asli Sunda, tetapi pendatang dari timur termasuk sisa-sisa laskar Mataram. Di DKI Jaya ada Kampung Ambon yang sekarang di kampung itu lebih sulit mencari orang Ambonnya daripada mencari orang Jawa. Ada Kampung Melayu yang lebih banyak orang Sundanya dan lain-lain. Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa di Kalimantan Barat, Ambon, Maluku Utara, Poso, Sampit dan Palangkaraya, janganlah kita mengecilkan kenyataan bahwa di berbagai daerah di Indonesia telah terjadi keserasian hubungan antara pendatang dengan penduduk lokal. Terjadinya perselisihan antara pendatang dan penduduk asli bukanlah hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di banyak belahan bumi yang lain.

Memang ada suku-suku yang sulit berbaur karena terlalu banyak antagonisme diantara keduanya; antara lain antara Dayak dan Madura yang disamping berbeda agama, orang Dayak suka memelihara babi, orang Madura mengharamkan babi. Orang Dayak introvert, orang Madura Extrovert. Ada pula berbagai macam stereotip misalnya orang Dayak lebih jujur, tidak ada pencuri, sedangkan orang Madura tentang hal ini banyak yang kurang baik. Orang Dayak membawa mandau hanya untuk ke kebun dan berperang, orang Madura kebiasaanya membawa pisau kemana-mana.

Juga antara orang Bali dan orang Sasak dari NTB. Disamping berbeda agama, antara Hindu dan Islam, bagi sebagian orang Sasak melihat Bali sebagai ex penjajahnya, karena kerajaan Karang Asem pernah menguasai P. Lombok. Juga orang Bali suka memelihara babi dan orang Sasak mengharamkannya. Stereotip lainnya, di Bali tidak ada pencuri, orang Sasak tidak demikian.

Hadirin,

Program Transmigrasi sering dituduh merusak budaya lokal. Transmigran itu pada umumnya orang-orang Jawa, Sunda, Madura, Bali, Sasak, Flores, Timor, Sumba yang datang dengan membawa peradaban dan budayanya.

Dibandingkan dengan penduduk lokal, transmigran ini pada umumnya dibidang pertanian menguasai teknologi yang lebih maju. Walaupun rata-rata pendidikan mereka rendah, tetapi mereka telah lama berpengalaman di pertanian. Kebudayaan bercocok tanam mereka lebih maju. Mereka mengajak penduduk lokal bercocok tanam yang lebih baik. Mereka juga mempelajari budaya dan adat istiadat penduduk lokal agar bisa bergaul lebih baik. Penduduk lokal tidak sedikit yang berhasil meniru cara-cara bercocok tanam para transmigran. Banyak pula transmigran yang belajar dari penduduk lokal dan menjadi mahir bertani di lahan gambut yang tidak mereka kenal sebelumnya. Unsur-unsur kebudayaan tersebut mudah diterima, karena merupakan unsur kebudayaan yang bersifat kebendaan dan terbukti memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Sangat berbeda apabila menyangkut unsur-unsur budaya yang berkaitan dengan sistem kepercayaan, seperti agama, falsafah hidup dan lain-lain. Mengenai interaksi antara transmigran dengan penduduk lokal Prof Parsudi Suparlan memiliki banyak sekali catatan, karena sejak tahun 70-an telah banyak ikut membina permukiman-pemukiman transmigrasi di berbagai tempat, juga di Irian Jaya.

Hampir disetiap propinsi, sebagai akibat dari mobilitas penduduk yang telah berjalan sejak lama, terbentuk kampung-kampung para pendatang, seperti "Kampung Jawa", "Kampung Ambon", "Pecinan", "Kampung Arab", "Kampung Melayu", dsb. Tetapi di kampung-kampung enclave tersebut pada waktu ini penduduknya bukan melulu orang yang namanya disebut, tetapi banyak pula suku lain. Demikian pula akibat program transmigrasi telah terbentuk banyak desa-desa eks permukiman transmigrasi yang penduduknya bukan hanya orang Jawa atau Sunda; banyak pendatang dari berbagai daerah lain yang turut mengadu nasib terutama sebagai pedagang atau pengrajin. Negara kita menjadi kaya karenanya.

Dalam melihat interaksi budaya antara pendatang dan penduduk setempat ini, terdapat perbedaan yang menyolok antara 2 keadaan, yaitu bilamana pendatangnya memiliki tingkat peradaban, pendidikan dan kesejahteraan yang lebih maju, dan bila peradaban, pendidikan dan kesejahteraan dari pendatangnya lebih terbelakang.

Bila pendatang berasal dari masyarakat yang tingkat pendidikan, kesejahteraan dan peradabannya lebih rendah dari yang didatangi, biasanya diawalnya terjadi hubungan yang baik, interaksi sosial yang asosiatif (menghasilkan kerja sama) dengan pendatang sebagai pekerja/buruh yang dibutuhkan oleh penduduk lokal, karenanya ikut meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Masalah mulai timbul apabila setelah puluhan tahun kemudian para pendatang itu meningkat pendidikan dan kesejahteraannya, meningkat jumlahnya, apalagi bila diantara mereka terdapat perbedaan yang mendasar; lebih-lebih bila kemudian para pendatang tersebut dirasakan mendesak kepentingan penduduk lokal. Kasus ini terlihat dalam masalah orang Madura terhadap Melayu di Kalimantan Barat serta orang-orang Buton di Ambon.

Bila pendidikan, kesejahteraan dan peradaban pendatang lebih maju dari pada penduduk lokal, maka diawalnya bisa tumbuh inferiority complex pada penduduk setempat. Tanpa pembinaan yang baik penduduk setempat sulit mengejar ketertinggalannya di bidang pendidikan dan kesejahteraan dari pendatang. Bila tidak ditangani dengan baik, persoalan akan muncul beberapa tahun kemudian karena perasaan iri, pendatang lebih sejahtera dari pada penduduk lokal. Dalam hal ini saya teringat pepatah masyarakat Minang yang gemar merantau : "Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung". Dengan filsafah itu, sepanjang yang saya ketahui, masyarakat Minang diperantauannya tetap bisa berdagang dengan baik diberbagai lingkungan masyarakatnya yang baru.

Hadirin,

Transmigrasi, dikemukakan oleh Prof. DR. Mubyarto, merupakan fenomena negara kita. Khas negara Indonesia, seperti FELDA dari Malaysia, Kibutz dari Israel, Kolkos dari Rusia, Kommune dari RRC, Saemaul Undong dari Korea, dsb.

Khas Indonesia, karena penyebaran penduduk yang diprakarsai dan difasilitasi oleh negara itu telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di Nusantara ini, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit. Prabu Dharmawangsa membawa orang-orang dari daerah dataran sebelah selatan Jawa Tengah (sekitar Yogya dan Solo) ke Jawa Timur ke daerah Kediri secara berangsur-angsur. Akhirnya jumlahnya sangat besar sekitar puluhan atau ratusan ribu. Dia lalu mendirikan keratonnya sendiri.

Kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram menggunakan penyebaran penduduk untuk meluaskan pengaruhnya. Kemudian Pemerintahan Hindia Belanda, Pemerintahan Jepang, lalu Pemerintahan Republik Indonesia, mulai dari Orde Lama, Orde Baru kemudian Orde Reformasi.

Ketika jaman Kolonial Belanda, pemerintahan Hindia Belanda dipaksa secara politik untuk berterima kasih dan membantu rakyat yang kelaparan (yang disebut *etische politik*), dan membantu swasta dalam membangun kebun-kebun karet di luar Jawa, Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan program transmigrasi (*namanya kolonisasi*) disamping irigasi dan edukasi.

Hasilnya selama 37 tahun dari tahun 1905 sampai dengan tahun 1942 sekitar 60.155 KK atau sekitar 235.802 jiwa dimukimkan sebagai kolonis. Jumlah itu belum termasuk kolonis spontan, yang cukup banyak, yang menyusul saudara-saudaranya yang telah sukses di perantauan.

Ketika Pemerintahan Jepang terdesak kebutuhan pangan dan pembinaan pemuda untuk dilatih sebagai militer (*sodancho*) bagi kebutuhan perang, maka diadakanlah transmigrasi (ketika itu namanya *Kokuminggakari*). Walaupun hanya sekitar 3,5 tahun lamanya, *program kokuminggakari*, yang artinya sukarela untuk pembangunan negara, jumlah penduduk yang dimukimkan sekitar 12.000 jiwa, cukup banyak kalau dibandingkan dengan kolonisasi selama 37 tahun.

Ketika pemerintahan peralihan, setelah kemerdekaan, terdesak oleh kemiskinan dan penyaluran eks pejuang yang menganggur, maka jalan keluarnya adalah transmigrasi (untuk eks pejuang namanya *Transmigrasi Sapta Marga*). Pada masa Orde Baru, karena terdesak oleh kepadatan penduduk Jawa yang semakin mencekam (istilah para pakar kependudukan), maka jalan keluarnya adalah transmigrasi secara besar-besaran (1 juta orang per tahun). Pemerintah kita pernah berambisi menjadi negara penghasil minyak kelapa sawit nomor satu di dunia. Negara terbesar adalah Malaysia, kita nomor dua. Melalui program PIR transmigrasi, Pemerintah membuka hutan untuk membangun kebun kelapa sawit secara besar-besaran. Semula direncanakan tahun 2005 Indonesia akan menjadi yang terbesar. Tapi sayang, ketika resesi datang, kebun-kebun, diantaranya milik Group Salim (220.000 hektar) diambil alih BPPN, kemudian dijual kepada investor dari Malaysia. Maka Malaysia akan tetap diatas.

Dalam Pelita VI (1993-1998), melalui program transmigrasi Pemerintah memukimkan para perambah hutan. Selama lima tahun itu ditempatkan (*resettle*) peladang berpindah sebanyak 150.000 KK atau sekitar setengah juta jiwa. Pertimbangannya pada saat itu (1990) jumlah perambah hutan di seluruh Indonesia bertambah terus sehingga menjadi 6.679.688 jiwa, dalam areal seluas 12.589.059 hektar. Mereka dituding telah melakukan pengrusakan hutan melalui penebangan (pembukaan hutan untuk berladang), dan karena caranya dengan membakar agar bersih dan abunya sebagai pupuk, maka dituding sebagai penyebab kebakaran hutan yang menghasilkan asap, walaupun tentu lebih banyak asap berasal bukan dari mereka. Mereka oleh pemerintah diberi lahan seluas 2 hektar agar kehidupannya lebih baik, dan mencegah lebih luas lagi hutan yang dibuka dan dibakar.

Ketika kita kembali menjadi pengimpor beras terbesar didunia, setelah berhasil mencapai swasembada pada tahun 1984, Pemerintah membuka rawa gambut seluas satu juta hektar di Kalimantan Tengah, membangun sawah seluas 600.000 hektar untuk program transmigrasi. Tetapi sayang karena kurang cermat dalam perencanaannya, akhirnya mega proyek itu menjadi terbengkalai.

Ketika Orde Reformasi menghadapi masalah penganggur yang banyak, buruh tani yang banyak dan pengungsi yang banyak, maka penyelenggaraan transmigrasi, yang tadinya telah menjadi menteri negara, dikembalikan menjadi sebuah departemen.

Itulah pola pikir semua regim yang pernah memerintah di negeri ini, sehingga kegiatan transmigrasi tidak pernah absen dalam setiap tahapan pembangunan.

Penempatan penduduk ke daerah-daerah lain di berbagai pelosok yang diprakarsai dan difasilitasi Negara di wilayah Nusantara ini telah berlangsung sejak zaman kerajaan-kerajaan dahulu, dengan berbagai alasan, antara lain pernah merupakan upaya negara dalam menjaga keutuhan wilayah dan mempersatukan bangsa, bahkan dalam rangka ekspansi, selanjutnya dengan motif-motif yang berbeda antara lain untuk meningkatkan taraf hidup sebagian dari masyarakat yang miskin, untuk menyebarkan penduduk dari daerah-daerah yang terlalu padat agar daerah-daerah yang jarang penduduknya dapat lebih cepat membangun daerahnya, untuk mempersatukan bangsa yang dipisahkan secara geografis, oleh suku, oleh peradaban, oleh agama, oleh perekonomian; untuk menjaga wilayah dengan memanfaatkan transmigran sebagai pagar betis wilayah, meningkatkan produksi pangan, mendorong percepatan pembangunan dan lain-lain. Para pendahulu kita menganggap transmigrasi itu penting .

Semua regim yang pernah berkuasa di wilayah ini selalu menyelenggarakan transmigrasi, karena ciri khas negara kita yang kepulauan ini, heterogennya penduduk, dan karena persebaran penduduknya yang tidak merata. Kegiatan yang sama itu memiliki nama yang berbeda, kecuali setelah kemerdekaan, namanya tetap transmigrasi. Setelah kemerdekaan (dimulai tahun 1950) sampai sekarang, persebaran penduduk yang dirancang negara tersebut tetap menggunakan nama transmigrasi, dan Pemerintah berhasil menempatkan sekitar 8 juta jiwa, dengan keturunannya sekarang diperkirakan menjadi sekitar 18 juta jiwa, atau sekitar 9 persen dari penduduk Indonesia. Persebaran penduduk yang diprakarsai dan difasilitasi Negara ini jumlahnya sangat kecil bila dibandingkan dengan persebaran penduduk secara spontan dan swadaya.

.Pemukiman-pemukiman transmigrasi itu kini telah berkembang menjadi desa-desa baru. Jumlahnya sudah sekitar 2.000 desa. Yang telah berkembang menjadi ibu kota kecamatan jumlahnya sekitar 80 buah, dan yang telah berkembang menjadi ibu kota kabupaten sekitar 10 buah. Dalam merancang desa-desa transmigrasi itu, berpedoman pada UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan desa, sehingga seluruh desa yang dibangun, menjadi seragam. Hal inilah yang dikritik keras oleh sosiolog Prof Selo Soemardjan, yang mengatakan dengan gaya yang khas bahwa maksud yang terkandung dalam UU itu untuk menghilangkan keragaman pemerintah desa dan mengubahnya menjadi pemerintah desa yang seragam di seluruh Indonesia. Seragam dalam bentuk, seragam dalam susunan, dan seragam dalam tugas serta cara kerja. Pemerintah desa akan dijadikan pemerintah paling bawah dalam struktur pemerintahan sipil. Desa baru tersebut menjadi lepas dari adat yang menjadi landasan tata hidup masyarakat desa semula.

Dari kritik Bapak Selo Soemardjan tersebut saya teringat sebuah buku (disertasi) yang ditulis Carrol Warren (1992) berjudul: *Desa Adat and Desa Dinas*. Penelitiannya dilakukan di Bali mempelajari tentang “desa” sesuai UU No 5 Tahun 1979 dan “Banjar” sesuai adat Bali.

Dalam buku tersebut semua desa di Indonesia telah berubah menjadi pemerintah desa berdasarkan UU tersebut, dan dia namakan sebagai “desa dinas”. Sedangkan Banjar di Bali dia namakan sebagai “desa adat”, yang berbeda sekali karakternya.

Sejak 20 tahun terakhir, banyak sekali kritikan terhadap program transmigrasi, semula dari luar negeri, kemudian merambat ke dalam negeri.

Kritikan itu sebetulnya tidak perlu terjadi kalau dalam pelaksanaannya pemerintah berhati-hati, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Menurut hemat saya, kegagalan atau kritikan itu ditujukan dalam kaitannya dengan beberapa hal: lingkungan hidup, hak azasi manusia, penghapusan ethnic/Jawanisasi, Islamisasi dan berbagai kegagalan serta penyimpangan. Lingkungan hidup sering dikaitkan dengan pembukaan hutan. Hak azasi manusia sering dikaitkan dengan pemindahan secara paksa atau tipu daya, dan kemiskinan yang terjadi dipermukiman-permukiman yang tanahnya tidak subur, baik secara alami maupun karena top soilnya tergusur, atau karena jauh dari akses pasar, sehingga hasil pertaniannya tidak bisa dijual.

Penghapusan ethnic/Jawanisasi sering dikaitkan dengan pengiriman orang-orang Jawa ke suatu daerah, sehingga penduduk asli menjadi minoritas. Islamisasi dikaitkan dengan masuknya transmigran Muslim ke daerah-daerah yang penduduknya non-muslim seperti Irian Jaya, Ceram, Timor-Timur, dsb. Serta kegagalan demi kegagalan yang menyengsarakan transmigran.

Presiden Argentina DR. Carlos Saul Menem, dalam acara *state dinner* di Istana Negara Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1996 menjelaskan kepada saya tentang program landreform di negaranya yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui *resettlement*, yang juga dilakukan negara Brasil dengan nama *Colonization and Agrarian Reform* di mana kepada setiap petani pesertanya diberikan tanah secara cuma-cuma seluas 60 acre atau kurang lebih 24,3 hektar.

Banyak negara melaksanakan program yang mirip transmigrasi, seperti di Malaysia dengan nama *Federal Land Development (Felda)*, di Jepang *Hokkaido Island Development*, di Papua New Guinea dengan nama *Small Holder Land Development*, di Sri Lanka *Mahaweli Project*, di Sudan *Rahad Irrigation*, di Vietnam *Migration Management and Development for Resettlement and New Economic Zone*, di Filipina *National Resettlement Administration/NARA* dan *Land Tenure Administration/LTA*, di Thailand *Self Defence Village*, di Korea *Integrated Resettlement Areas*, dsb. Program tersebut ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Pola-pola resettlement tsb. yang paling banyak ada di Amerika Latin. Di Amerika Serikat dan di Australia berlangsung berdasarkan *Home Stead Act*. Dalam pelaksanaannya mereka itu aman-aman saja, karena mereka cukup baik dalam perencanaan dan hati-hati dalam pelaksanaannya.

Hingga tahun 1990, diseluruh Indonesia jumlah migran (penduduk yang bertempat tinggal diluar provinsi tempat lahir), tercatat sekitar 14.655.049 jiwa (sekitar 8% dari jumlah penduduk Indonesia).

Dari tahun ketahun, jumlah penduduk migran terus meningkat, sesuatu yang positif dari aspek peningkatan mobilitas penduduk. Tahun 1971, jumlah migran di Indonesia tercatat 5,8 juta jiwa, tahun 1980 10,2 juta jiwa, dan tahun 1990 14,7 juta jiwa. Mobilitas penduduk dari pulau Jawa sendiri relatif tinggi dibanding dengan penduduk dari pulau lain. Sekitar 70,4% dari 14.655.049 penduduk migran tersebut terjadi pada penduduk dari pulau Jawa. Sisanya, (sekitar 29,6%), terjadi pada penduduk Sumatera (15,2%), Kalimantan (3,2%), Sulawesi (6,5%), dan pulau – pulau lain (4,7%). Tetapi sebagian besar perpindahan penduduk dari pulau Jawa itu terjadi antar provinsi di pulau Jawa sendiri.

Migrasi penduduk pulau Jawa ke luar pulau Jawa dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan sensus, tahun 1971 berjumlah 1.275.131 jiwa, tahun 1980 menjadi 2.367.727 jiwa dan tahun 1990 berjumlah 3.338.015 jiwa. Jumlah itu masih sangat kecil dibanding dengan jumlah penduduk pulau Jawa, dan pertambahan penduduk di pulau Jawa selama ini. Jumlah penduduk Pulau Jawa yang bermigrasi keluar Pulau Jawa dibawah 4% dari penduduk Pulau Jawa. Bandingkan, misalnya, dengan orang Minang. Jumlah orang Minang yang tinggal diluar Sumatera Barat lebih banyak dari pada yang tinggal di Sumatera Barat.

Rendahnya perpindahan penduduk keluar Pulau Jawa dan derasnya arus masuk ke Pulau Jawa menyebabkan lonjakan drastis jumlah penduduk Pulau Jawa dari tahun ke tahun.

Jumlah migran dari luar Pulau Jawa yang masuk ke Pulau Jawa jauh lebih besar daripada migran dari pulau Jawa ke luar Pulau Jawa.

Tingkat migrasi antar pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya sangat kecil. Angka migrasi orang – orang Kalimantan ke Pulau Jawa mencapai sekitar 80% dari seluruh penduduk yang keluar Kalimantan. Yang menuju Sumatera hanya 8,34%, Ke Sulawesi 7,50%, dan ke pulau – pulau lain sekitar 3,16%. Dari migrasi orang – orang Sumatera keluar Pulau Sumatera, sekitar 90,13% diantaranya masuk ke Pulau Jawa, sisanya ke Kalimantan (4,23%), Sulawesi (2,93%), dan selebihnya ke pulau – pulau lain. Migrasi penduduk Sulawesi lebih merata, sekitar 29,31% yang ke Pulau Jawa, dan selebihnya menuju Sumatera (12,9%), Kalimantan (32,29%), dan Pulau – pulau lain (26,35%). Sebagian besar migrasi penduduk dari Maluku dan Irian Jaya, menuju Sulawesi (sekitar 43,08%), sisanya ke Pulau Jawa (37,66%), Kalimantan (3,44%), dan Sumatera (20,40%).

Persentase Migrasi Keluar Pulau Semasa Hidup di Indonesia Menurut Pulau/Daerah Asal dan Pulau/Daerah tujuan Tahun 1971 dan 1990 :

Pulau/ Daerah asal	Thn	Pulau /Daerah asal				
		Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Pulau lain
Sumatera	1971	-	94,53	1,76	2,08	1,63
	1990	-	90,36	4,23	2,46	2,95
Jawa	1971	89,68	-	4,65	2,94	2,73
	1990	68,14	-	17,45	7,47	6,94
Kalimantan	1971	17,19	74,98	-	5,73	2,10
	1990	9,34	80,00	-	7,50	3,16
Sulawesi	1971	34,24	37,42	8,65	-	19,69
	1990	12,09	29,31	32,25	-	26,35
Pulau Lain	1971	25,06	56,70	2,72	15,15	-
	1990	11,07	37,66	8,19	43,08	-

Pada tahun 1990, jumlah penduduk migran di Indonesia tercatat sekitar 8% dari seluruh penduduk, sedangkan penduduk yang lahir di Pulau Jawa dan tinggal di luar Pulau Jawa kurang dari 4% dari seluruh penduduk Pulau Jawa. Secara umum pola migrasi penduduk Indonesia masih terjadi dalam lingkup pulau yang sama (*intra island*). Pola migrasinya juga lebih banyak dari kawasan timur ke kawasan barat, dan dari utara ke selatan (disamping Sulawesi Selatan ke Sulawesi tenggara)

Data sensus penduduk menunjukkan, bahwa kenaikan presentase jumlah penduduk di kawasan timur Indonesia sangat rendah, bahkan boleh dikatakan tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 60 tahun, sejak sensus penduduk pertama tahun 1930 sampai sensus penduduk terakhir tahun 1990. Persentase jumlah penduduk Sulawesi (terhadap seluruh penduduk Indonesia) dari tahun 1930 hingga 1990, bertambah 0,1% (dari 3,6% menjadi 7%); Kalimantan 1,5% (dari 3,6% menjadi 5,1%); Irian Jaya, Maluku, dan pulau – pulau lain 0,4% (dari 7,3% menjadi 7,7%); Sumatera 6,8% (dari 13,5% menjadi 20,3%); Jawa dan Madura turun 8,8% (dari 68,7% menjadi 59,9%)

Pada mekanisme arus perpindahan alamiah, orang cenderung bergerak dari daerah yang kurang makmur atau kurang maju ke daerah yang lebih makmur dan lebih maju. Wajarlah bila terjadi gerakan perpindahan penduduk dari daerah – daerah yang kurang sejahtera ke daerah yang lebih sejahtera karena dorongan untuk memperoleh kesejahteraan.

Kenyataan menunjukkan, bahwa hingga awal tahun 1970-an, rata – rata pendapatan penduduk luar Pulau Jawa lebih tinggi di banding penduduk Pulau Jawa. Tetapi, sejak tahun 1970-an rata – rata pendapatan di Pulau Jawa lebih tinggi dibanding pendapatan penduduk luar Pulau Jawa.



Masalahnya sekarang ialah, bagaimana mendorong dan memikat orang untuk pindah dari Pulau Jawa (dengan pendapatan yang lebih tinggi) ke daerah yang pendapatan rata – ratanya lebih rendah (tetapi sangat potensial untuk lebih sejahtera di masa depan). Jadi, yang dapat ditawarkan oleh luar Jawa saat ini ialah potensi, bukan kondisi. Dengan daya tarik berupa potensi terpendam seperti itu, sebaiknya yang mengisi daerah – daerah kosong di luar pulau Jawa, terutama di kawasan timur, ialah orang – orang yang berjiwa pionir.

Dari analisis data statistik juga tampak, bahwa sebagian besar penduduk yang berpindah dari luar Jawa ke Pulau Jawa ialah mereka yang rata – rata tergolong terdidik (sebagian Sarjana), serta memiliki latar belakang kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dibanding mereka yang meninggalkan Pulau Jawa. Sementara itu, 85% transmigran dari Pulau Jawa adalah *drop out* SD. Kondisi itu tentu tidak menguntungkan bagi pembangunan di daerah luar Jawa, karena terjadinya *brain-drain*.

Hadirin,

Dalam definisi formalnya, yang dimaksud dengan otonomi daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur, mengurus rumahtangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksana Otonomi Daerah adalah Kabupaten/Kota atau Daerah Tingkat II, yang dimulai bulan Januari 2001. Banyak pakar memperkirakan setelah otonomi daerah, daerah-daerah akan mengurus daerahnya sendiri-sendiri, dan belum tentu mau menerima penduduk dari daerah lain. Dalam memilih pimpinan, kalau bukan putra daerah akan mereka tolak. Muncul rasa ethnocentrisme kedaerahan sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah ini. Ada kecenderungan daerah kurang memperhatikan kepentingan daerah lain, atau kurang peduli dengan kepentingan nasional. *Trend* ke sana sudah dapat kita rasakan akhir-akhir ini, bahkan jauh sebelum otonomi daerah diberlakukan. Kepentingan nasional menjadi nomor dua, diganti oleh kepentingan kedaerahan, kesukuan, dsb.

Dalam TOR, Panitia memberikan hipotesis :

*Pelaksanaan otonomi daerah akan menghasilkan ketidak setaraan antara penduduk asli dan pendatang, atau ada diskriminasi yang dilakukan penduduk asli terhadap para pendatang. Dampak yang lebih permanen yang akan dipanen dari pelaksanaan otonomi daerah adalah peningkatan konflik antar suku dan antar golongan yang menuju kearah disintergrasi bangsa.*

Hipotesa adalah jawaban sementara sebelum pembuktian. Oleh karena itu terhadap hipotesa itu kita boleh setuju boleh tidak. Hipotesa hanya sekadar asumsi sementara, yang masih perlu adanya pembuktian. Diantara yang hadir di sini saya yakin minimal ada dua kelompok, yakni yang sepaham dan yang tidak sepaham dengan hipotesa tersebut. Saya termasuk yang kedua. Jika diawal era otonomi daerah ini terdengar keras tuntutan untuk “Putera daerah” bagi jabatan-jabatan di daerah, menurut hemat saya lebih merupakan reaksi atas praktek dropping dari Pusat yang telah berlangsung selama ini. Jika prosesnya berlangsung wajar atas dasar demokrasi, pada waktunya orang akan diukur atas dasar kemampuannya (merit system), dan tidak atas dasar asal usulnya. Pada waktu inipun kita menyaksikan ada orang Sunda jadi Gubernur Kalimantan Timur, pernah Hasan Slamet orang Jawa jadi Gubernur Maluku, ada orang Aceh jadi Bupati Boyolali, dan mereka semua dihargai oleh penduduk setempat . Tentu ada pula ditempat lain yang dihujat penduduk setempat, karena ketidak mampuannya.

Dalam forum ilmiah seperti sekarang ini, syah-syah saja kita berbeda pendapat.

Heterogenitas penduduk Indonesia haruslah dipandang sebagai suatu rachmat dan keunggulan dari negara kebangsaan kita, karena akan dapat melahirkan hibrida. Hibrida selalu lebih baik, karena memiliki kekuatan *hybrid vigor*. Pada saat perang Vietnam berakhir, Negara Amerika Serikat yang paling banyak menampung pengungsi perahu (*boat people*) orang-orang Vietnam yang terusir. Disamping merasa berdosa mencetuskan perang Vietnam yang kejam, alasan Amerika Serikat meminta banyak, karena kultur Amerika sudah mulai homogin, perlu masuk *breed* baru yang segar, yang akan membangun dan meningkatkan heterogenitas penduduk Amerika. Hasilnya antara lain Tiger Wood, pemain Golf top dunia yang ibunya orang Vietnam. Untuk memikat berbagai etnis, Kabinet Bush memasukan berbagai etnis kedalamnya, antara lain seorang imigran kelahiran Taiwan, *Elaine Chao* sebagai Menteri Tenaga Kerja.

Orang atau bangsa yang kuat sajalah yang siap menerima perbedaan. Orang atau bangsa yang lemah, alergi terhadap perbedaan.

Bahwa banyak daerah menghendaki pimpinannya putra daerah (*loco centries*) , menurut pendapat saya, bukan sebagai akibat diberlakukannya otonomi daerah, tetapi lebih karena terlalu lama mereka ditekan menerima *dropping* pimpinan dari pusat yang sering orang luar daerah. Putra daerah kurang diberi kesempatan. Kita ingat kasus Ismail Suko calon Gubernur Riau yang ditolak Pemerintah Pusat padahal memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Gubernur Riau dan digantikan dengan Gubernur yang dari suku Jawa. Setelah Gubernur Cilik Riwut dan Uvang Urai, puluhan tahun di 4 propinsi di Kalimantan, tidak pernah ada Gubernur yang orang Dayak, dan hanya sedikit sekali yang menjadi Bupati/Walikota. Di daerah-daerah dimana putra daerah selalu mendapat kesempatan, seperti di P. Jawa, isu putra daerah itu tidak muncul.

Daerah demikian itu dapat menerima siapa saja asal mampu. Jadi tuntutan putra daerah merupakan akibat dari terlalu lamanya daerah itu menerima pemaksaan pemerintah pusat, bukan sifat aslinya (*genuine character*).

Saya sulit membayangkan dapat majunya suatu propinsi atau kabupaten yang seluruh penduduk dan tokoh-tokoh yang memimpinya hanya terdiri dari satu etnis tertentu, satu agama tertentu, satu bahasa tertentu, satu budaya tertentu, bahkan mungkin satu keturunan berkeluarga. Yang akan dihasilkan oleh kondisi semacam itu *inbreeding* dan lemah, yang takut menghadapi tantangan, dan alergi terhadap pendatang.

Dengan otonomi daerah, daerah seharusnya menjadi lebih kuat, bukan menjadi lebih lemah, dan serba ketakutan. Takut tersaingi orang Jawa, takut tersaingi orang Bugis, takut orang Madura, takut orang Ambon, dsb. Kekuatan itu harus dilahirkan dari kemandirian. Kemandirian yang bukan keterisolasian, tetapi dengan membangun ketergantungan dalam kekuatan, membangun negara kesatuan yang lebih kuat. Seperti negara Jepang sekarang adalah negara yang paling tergantung, bukan mengisolasi diri. Demikian pula Singapura sangat tergantung negara lain. Tetapi otoritas mereka tetap kuat. Otonomi daerah harus melahirkan kekuatan-kekuatan baru. Mencari Bupati yang tepat dan mengundang investor dari luar untuk menggali sumberdaya alam yang tersedia; bukan mengisolasi diri.

Tak dipungkiri, bahwa pertemuan dua kelompok manusia (lokal dan pendatang) dengan budaya yang berbeda, dapat menimbulkan konflik sosial dan disorganisasi sosial. Saya menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan manusia, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua suatu hari akan berhadapan dengan seseorang atau kelompok sosial yang berbudaya lain dengan kita. Disini menjadi sangat penting peran sosiolog dan antropolog untuk ikut membantu menyelesaikan konflik tersebut. Dan saya percaya bahwa para antropolog kita mampu untuk menangani konflik sosial yang terjadi. Masalahnya mungkin, karena selama ini para antropolog kita belum diberikan peran yang seluas-luasnya untuk mengatasi konflik tersebut. Mereka juga kurang aktif mengatasi potensi-potensi konflik yang mungkin timbul sebelum konflik terjadi.

Alvin W. Wolfe dan Honggang Yang dalam bukunya “ Anthropological Contributions to Conflict Resolution “ ( 1996, University of Georgia), meneguhkan keyakinan saya bahwa antropolog dapat berperan banyak dalam penyelesaian konflik. Dengan keanekaragaman suku bangsa yang kita miliki, maka besar pula potensi konflik yang ada. Sebaiknya para antropolog dan sosiolog berperan aktif meniadakannya sejak dari awal terjadinya interaksi social dari kebudayaan yang berbeda itu.

Kalaupun akhirnya muncul juga konflik yang tidak kita harapkan, diharapkan pula dapat diselesaikan dengan baik oleh ahli-ahli sosiologi dan antropologi. Tugas preventif biasanya jauh lebih murah dan mudah daripada represif dan rehabilitasi. Para ahli antropologi/sosiologi mengetahui dengan baik cara-cara untuk menumbuhkan interaksi sosial yang baik, asosiatif, melalui kontak sosial dan komunikasi sosial yang baik. Bila muncul konflik, dapat dilakukan “akomodasi” yaitu proses menuju keseimbangan interaksi antara individu dan kelompok sehubungan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Ini merupakan usaha untuk meredakan pertentangan.

Para ahli tahu berbagai bentuk “akomodasi” yang dapat dilakukan seperti coercion, compromise, arbitration, mediation, conciliation, stalemate dan lain-lain. Dengan cara-cara ini, dapat dicapai keadaan yang lebih kondusif untuk proses asimilasi dan menghindarkan dari kemungkinan disintegrasi masyarakat. Yang saya maksudkan asimilasi disini adalah proses sosial berupa usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara pihak-pihak yang terlibat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama. Asimilasi akan berjalan dengan baik, apabila ada keinginan saling mendekat satu sama lain, tidak ada halangan dalam berinteraksi, bersifat primer dan langsung. Kita mengetahui, adanya faktor-faktor yang dapat mempermudah dan faktor-faktor yang dapat menghalangi asimilasi. Yang penting dari faktor-faktor tersebut adalah faktor “toleransi”. Faktor ini sangat penting untuk ditumbuh kembangkan pada dua kelompok yang sedang konflik. Apabila usaha asimilasi dapat dicapai, maka inilah bentuk yang mendekati ideal dari suatu integrasi.

Yang juga penting dalam sistem otonomi daerah itu adalah terbangunnya tujuan dan cita-cita kebangsaan (goals and objective) dengan sistim sosial (social system) yang disepakati bersama, dan sistim tindakan (action system) dan sistem sanksi (sanction system) yang jelas, sehingga dapat tercapai masyarakat madani, masyarakat sipil yang demokratis, rakyat yang berdaulat, mengakui hak-hak minoritas, terlindunginya hak-hak asasi manusia, persamaan hak di depan hukum, dan kemampuan membatasi kekuasaan pemerintah (*least government*), karena kemampuan masyarakat sudah bisa menggantikannya. Untuk itu adalah baik membangun karakteristik kedaerahannya dengan mengangkat hukum-hukum adat setempat, asal lebih menjamin rasa keadilan bagi masyarakatnya dan memiliki kekuatan yang lebih menjamin bila dibandingkan dengan hukum nasional. Di negara kita, Pemerintah menjadi sangat penting dan menentukan. Ketika saya bertanya kepada Menteri Pertanian di salah satu negara bagian di Australia tentang rencana pertanian di negara bagian tersebut, jawabannya cukup mengagetkan: “Coba tanyakan kepada mereka”, sambil menunjuk asosiasi-asosiasi yang diundang dalam *dinner meeting* tersebut. “Kami, Pemerintah, mengikuti saja apa program mereka. Di negara kita semua inisiatif datang dari masyarakat. Mereka cukup professional untuk itu”. Di negara kita, Pemerintah menjadi sangat menentukan, dan rakyat menjadi kurang berdaya. Otonomi daerah harus mampu membangun inisiatif masyarakat tidak menunggu petunjuk dari Pemerintah Daerah, apalagi dari pusat.

Tentang hal ini kita bisa belajar dari masyarakat Minang, yang secara adat dan kultural, berciri demokratis. Bagi masyarakat Minang, Pemerintah atau penguasa itu bukan segala-galanya. Mereka (para pejabat) dimata masyarakat Minang hanya “Didahulukan selangkah, ditinggikan seranting”, tidak ada yang luar biasa dari sudut pandangnya rakyat Minang. Oleh sebab itu, tak aneh apabila ada anggota masyarakat yang berani menyetop mobil Bupati untuk sekedar minta rokok dan bercakap-cakap sekedarnya.

Hadirin,

Thesis John Naisbitt adalah : ketika globalisasi tiba dan batas-batas wilayah (negara) mulai mencair, maka semua identitas kultur terdiversifikasi menjadi keping-keping yang berserakan.

Yang kemudian diperingatkan oleh Romo Mudji Sutrisno yang mengatakan: Ketika masyarakat masih tradisional, acuan nilai bersama yang menjadi perekatnya bersumber pada nilai persaudaraan, kekeluargaan dan kekerabatan. Ketika masyarakat mulai diterpa oleh modernisasi dengan pengembangan teknologi dan mendasarkan diri pada rasionalitas praktis dan teknis, maka acuan nilai bersama seperti adat dan tradisi diguncang dan ditantang oleh perekat baru, yaitu nilai rasionalitas itu sendiri. Hal-hal yang tidak bisa ditangkap dengan acuan akal manusia atau tidak bisa dimengerti oleh akal sehat, dibuanglah ia dari perekat baru itu.

Tesis Samuel P. Huntington: Negara bangsa akan tidak ada lagi. Sekarang sudah tampak munculnya masyarakat dan kepentingan pluralistik di dalam batasan negara. Hasilnya adalah kekacauan akibat benturan peradaban. Untuk mengatasinya, kita harus belajar untuk hidup dalam sebuah dunia multi peradaban dengan distribusi kekuasaan yang luas di antara masyarakat daerah dan negara.

Oleh kedua tokoh futurolog (barat) tersebut kita diingatkan bahwa budaya beserta peradabannya akan terus bergerak kedepan. Dan menyertainya adalah akibat-akibat yang perlu kita waspadai. Jangan takut atau khawatir. Globalisasi yang terbawa informasi, maupun yang dibawa para migran, baik yang bergerak secara alami ( tarikan ekonomi) maupun yang dibuat pemerintah melalui berbagai program, termasuk program transmigrasi, akan membawa perubahan. Perubahan itu sesuatu yang pasti. Kalau kita menahannya, hanyalah bersifat sementara. Perubahan itu harus menjadi kekuatan baru.

Menurut pengalaman di lapangan, kita tidak perlu khawatir bahwa interaksi antar pendatang dan penduduk lokal akan menghancurkan budaya asli setempat, karena tidak ada budaya yang dihancurkan, tidak ada penggantian budaya secara drastis yang akan terjadi adalah proses akulturasi. Kebudayaan akan tetap ada sesuai sifat dan hakekatnya, yaitu dinamis dan mengisi serta menentukan jalannya kehidupan manusia. Di negara kita, revolusi budaya itu tidak ada. Revolusi hijau (budaya bercocok tanam) hanya namanya saja Revolusi. Kejadiannya sangat alami yakni perubahan penggunaan teknologi pertanian secara sistimatis dalam jangka waktu yang relatif lama, tidak melalui paksaan, seperti revolusi budaya di Cina. Para petani mulai diperkenalkan dengan pupuk kimia, obat pembasmi penyakit/hama/gulma, diperkenalkan berbagai bibit unggul yang lebih baik, dsb.

Memang terjadi perubahan, tapi perubahan itu berjalan cukup lambat, melalui suatu proses yang panjang, bahkan di beberapa daerah masih banyak yang tetap menggunakan teknologi tradisional. Dan itu boleh-boleh saja, tidak ada paksaan, dan didalam prosesnya tidak terjadi benturan budaya. Namun harus diakui perubahan itu pasti akan membawa korban. Itu yang perlu kita eliminir atau kurangi.

Budaya itu merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang dianggap baik dan sudah teruji dalam jangka lama. Kebiasaan jelek akan hilang, atau dihilangkan dalam proses pematangan suatu budaya. Yang sering berbentur adalah penyimpangan dari budaya itu, atau salah satu elemennya, oleh salah satu anggotanya. Korupsi misalnya, atau mencuri, bukanlah budaya yang diterima oleh masyarakat, melainkan kebiasaan jelek dari seseorang atau sekelompok orang, yang merupakan counter-culture yang pada saatnya akan dihabisi oleh masyarakat itu sendiri.

Pelakunya sendiri kalau mau jujur pasti akan mengatakan kebiasaan itu jelek, bahkan kalau ditanya dia tidak akan mengaku. Siapa pun akan mengatakan bahwa korupsi atau maling itu nilainya jelek. Oleh karena itu tidak akan berkembang menjadi budaya.

Agama biasanya bisa bekerjasama dengan budaya, karena keduanya memiliki nilai-nilai yang baik. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai yang baik dan telah lama teruji, dan benar-benar menguntungkan bagi banyak pihak, sehingga menjadi pedoman hidup mereka.

Apakah perlu budaya itu dipertahankan kemurniannya ?

Bagaimana caranya melindungi kemurnian budaya lokal itu ? Apakah melalui konservasi, melalui isolasi atau bagaimana.

Saya pernah membaca sebuah jargon: budaya akan hancur oleh penjaga normanya, dan budaya akan berkembang melalui innovators (*local genius*) . Wayang Sunda bisa bertahan dan bahkan kembali diminati oleh anak-anak muda, karena Asep Sunarja mampu bervariasi tanpa harus keluar dari “pakem” wayang Sunda. Justru sebaliknya wayang Sunda yang klasik hampir mati karena kekurangan peminat. Peminatnya hanya orang-orang tua, yang jumlahnya tidak banyak, dan semakin hari semakin habis. Demikian juga dengan ketoprak, kesenian Jawa yang akhir-akhir ini justru diminati oleh masyarakat, karena telah dimodifikasi menjadi tontonan yang menarik melalui acara “Ketoprak Humor”. Bahkan acara ini telah mendapat rating tertinggi dari pemirsa TV. Saya secara pribadi tidak terlalu khawatir. Biarkan peradaban itu menjalani proses evolusi secara alami, ada yang cepat ada yang lambat. Kebudayaan itu sendiri, sebagai sebuah karya seni harus kita selamatkan, tanpa harus mengekang, terkerangkeng dalam peradaban kunonya. Kita harus mampu memisahkan antara kebudayaan sebagai value dan peradaban sebagai suatu proses kehidupan. Kebudayaan adalah milik bangsa yang harus kita pelihara. Tetapi peradaban suatu etnis jangan distop pada suatu tingkatan tertentu.

Kebudayaan itu maju berkembang mengikuti peradabannya. Hak asasi mereka untuk turut berkembang sesuai kemajuan zaman. Saya sangat bangga ketika menghadiri seorang teman dari Irian Jaya yang tegap mengenakan pakaian toga pada saat dia diwisuda karena baru saja meraih gelar PhD di Harvard University.

Dan sama bangganya ketika saya menghadiri pembukaan suatu pameran kesenian internasional, dengan patung Asmat dari Irian Jaya yang disejajarkan dengan patung-patung hasil karya pemahat ulung dunia di suatu galeri di Perancis. Pemahatnya berdiri gagah berpakaian rapi stelan jas disebelah patung karyanya yang asli Irian Jaya.

Budaya itu dinamis. Perubahan yang terjadi tidak selalu akibat dari pengaruh luar. Kebudayaan dari manusia yang pertama hidup di muka bumi ini, tanpa pengaruh darimana pun bergerak maju, berubah menjadi lebih efisien, dan mencari yang lebih baik, karena kemampuan intelektual dari anggota masyarakatnya, namun berlangsung sangat lambat. Interaksi antar kelompok masyarakat mempercepat proses kemajuan. Yang tadinya jalan kaki kini naik kendaraan, yang tadinya teriak, kini menggunakan handphon, dsb.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya mobilitas penduduk akan mempercepat perubahan peradaban dan kebudayaan manusia, dan itu tidak bisa dihalang-halangi.

Kini sedang berkembang pemikir-pemikir berhaluan "*new aged*" yang mencari hakekat hidup yang sebenarnya, tanpa dibatasi oleh penghalang-penghalang normative atau ritual-ritual yang tidak fungsional .

Demikian tadi sekedar pemikiran saya sebagai "orang luar" yang bukan antropolog maupun sosiolog dalam melihat potensi konflik antar suku dan disintegrasi bangsa sebagai akibat pelaksanaan otonomi daerah. Saya tidak memungkiri, bahwa disana sini akan terjadi atau akan muncul ethnocentrisme kedaerahan yang kuat serta in-gorup feeling yang berlebihan. Tetapi saya yakin bahwa ini hanya sementara saja. Dengan berjalannya waktu, yang akan berlaku adalah tuntutan zaman dan kemajuan peradaban manusia modern yaitu "merit system". Harus kita ingat, bahwa kita sedang mengalami "Perubahan sosial" dan dalam setiap perubahan, diawalnya pasti timbul gejolak, namun akan kembali normal setelah itu. Seperti yang saya kemukakan didepan, pada saat-saat seperti sekarang ini (terjadinya perubahan sosial), peran sosiolog dan antropolog menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Dengan tokoh-tokoh seperti Prof. Parsudi Suparlan, Prof. Budisantoso, Prof. Selo Soemardjan dan banyak lagi nama yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, saya berkeyakinan beliau-beliau tersebut dapat berbuat banyak untuk memberikan warna pada perubahan sosial atau perubahan masyarakat menjadi kemajuan masyarakat yang membahagiakan masyarakat.

Semoga Allah SWT. tetap memberikan rachmat dan ridhoNya bagi bangsa ini,  
yang telah dengan susah payah mencapai kemerdekaannya.  
Sekian, terima kasih.

Jakarta, April 2001

Siswono Yudo Husodo